



## Arah dan Tantangan Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Studi Literatur

Rizky Alfi Syahrin<sup>1</sup>, Juliani<sup>2</sup>, Silvi Sahpitri<sup>3</sup>, Yulia Rama Salsabilla<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: [rizkyalfisyahrin21@gmail.com](mailto:rizkyalfisyahrin21@gmail.com).

### ABSTRAK

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, moral, dan kompetensi peserta didik. Perkembangan global serta tuntutan era Society 5.0 mendorong perlunya kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, inovatif, dan berorientasi masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan tantangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan regulasi kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan Islam mengalami pergeseran menuju penguatan kualitas pendidikan, integrasi nilai keislaman dan ilmu pengetahuan, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan moderasi beragama. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan mutu antar lembaga pendidikan Islam, keterbatasan kompetensi pendidik, lemahnya manajemen pendidikan, serta kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi optimal dalam pembangunan masyarakat madani Indonesia.

Kata Kunci: *Era Society 5.0, Kebijakan Pendidikan Islam, Moderasi Beragama, Studi Literatur.*

### ABSTRACT

*Islamic education is an integral part of the national education system that plays a strategic role in shaping students' character, morality, and competencies. Global developments and the demands of the Society 5.0 era require Islamic education policies to be adaptive, innovative, and future-oriented while maintaining Islamic values. This study aims to analyze the directions and challenges of Islamic education policies in Indonesia based on a literature review. The research method employed is a literature study by examining various sources, including books, scholarly journal articles, and relevant educational policy regulations. The findings indicate that Islamic education policies are shifting toward strengthening educational quality, integrating Islamic values with science and technology, digitalizing learning processes, and reinforcing religious moderation. However, the implementation of these policies still faces several challenges, such as disparities in educational quality among Islamic institutions, limited teacher competencies, weak educational management, and gaps between normative policies and classroom practices. This study concludes that Islamic education policies require stronger planning, implementation, and evaluation to effectively respond to contemporary challenges and contribute to the development of a civil society in Indonesia.*

*Keywords: Era Society 5.0, Kebijakan Pendidikan Islam, Moderasi Beragama, Studi Literatur.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sejak masa awal perkembangan Islam, pendidikan berperan sebagai sarana utama dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan akhlak mulia. Dalam konteks modern, pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk menjaga identitas keagamaannya, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Elman, 2024).

Memasuki era Society 5.0, tantangan sosial yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan multidimensional, sehingga pendidikan ditempatkan sebagai pusat perubahan dalam membangun manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Kondisi ini mendorong arah kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan Islam, untuk berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan global. Pendidikan Islam diarahkan tidak hanya sebagai sarana pewarisan nilai-nilai keislaman, tetapi juga sebagai penggerak terbentuknya komunitas pembelajaran yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Arah kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi antara nilai religius, penguasaan ilmu pengetahuan, serta pengembangan kompetensi abad ke-21 melalui kurikulum yang responsif terhadap inovasi digital (Rozak, 2021).

Meskipun arah kebijakan pendidikan Islam telah disesuaikan dengan tuntutan era Society 5.0, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang terdiri atas visi, misi, landasan dan tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, serta komponen pendukung lainnya, sering kali belum dikelola secara optimal. Berbagai komponen tersebut masih berjalan secara tradisional, alami, dan kurang terencana, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi pendidik dalam pemanfaatan teknologi, lemahnya perencanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan, serta kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik pembelajaran di lapangan (Fadli et al., 2024).

Peneliti berpandangan bahwa, arah kebijakan pendidikan Islam perlu diperkuat melalui strategi implementasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan era Society 5.0. Kebijakan pendidikan Islam tidak hanya harus bersifat normatif dan konseptual, tetapi juga aplikatif dengan memastikan seluruh komponen pendidikan berjalan secara terintegrasi dan terencana. Penguatan kapasitas pendidik, pembaruan kurikulum berbasis digital, serta tata kelola lembaga pendidikan Islam yang profesional menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara arah kebijakan dan realitas praktik pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berperan optimal dalam mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta kompeten menghadapi tantangan global.

Dalam perspektif historis, pendidikan pada era reformasi hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap sistem pendidikan pada masa Orde Baru yang cenderung sentralistik dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Reformasi kebijakan pendidikan dilaksanakan secara lebih komprehensif dengan mencakup berbagai bidang strategis, seperti pendidikan, agama, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan lingkungan hidup, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pendidikan

yang demokratis, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, arah kebijakan pendidikan Islam semakin ditegaskan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berperan penting dalam pembentukan karakter, moral, dan kompetensi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Maliki, 2022).

Sebagai wujud konkret dari arah kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan Islam. Regulasi ini menegaskan bahwa pendidikan agama bertujuan memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, sedangkan pendidikan keagamaan berorientasi pada penguasaan ilmu agama secara mendalam dan pencetakan ahli ilmu agama. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi tujuan pendidikan Islam dalam kurikulum, serta kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas praktik pendidikan di lapangan (Azis, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari aspek regulasi, arah pengembangan, maupun penyesuaiannya terhadap tuntutan global dan era Society 5.0. Namun, beragam kebijakan yang telah dirumuskan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi yang optimal di tingkat praksis pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan yang diidealkan dengan tantangan nyata yang dihadapi lembaga pendidikan Islam, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menelaah secara sistematis bagaimana arah kebijakan pendidikan Islam dikembangkan serta tantangan apa saja yang mengiringi implementasinya dalam konteks pendidikan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis arah serta tantangan kebijakan pendidikan Islam melalui pendekatan studi literatur. Kajian ini difokuskan pada penelusuran berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui studi literatur ini, diharapkan dapat diidentifikasi kecenderungan arah kebijakan pendidikan Islam serta tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya, sehingga hasil kajian ini dapat menjadi rujukan akademik dan rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif, sistematis, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Assingily, 2021). Studi literatur dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik arah dan tantangan kebijakan pendidikan Islam, meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan Islam. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterkaitan substansi, kredibilitas sumber, serta keterkinian publikasi agar data yang digunakan memiliki relevansi dan validitas akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database jurnal ilmiah dan perpustakaan digital, kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan Islam dan tantangan implementasinya. Selanjutnya, data diinterpretasikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan pendidikan Islam. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan implikasi konseptual yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut adalah hasil penelitian dari arah dan tantangan kebijakan pendidikan Islam berbasis studi literatur:

### ***Arah Kebijakan Pendidikan Islam***

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan menuju penguatan kualitas dan relevansi pendidikan. Pendidikan Islam tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pewarisan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (Ismael, 2023). Pergeseran ini menunjukkan adanya kesadaran kebijakan bahwa pendidikan Islam harus mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya, yang menurut peneliti merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat posisi pendidikan Islam di tingkat nasional.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pendidikan Islam diarahkan untuk berkontribusi dalam pembentukan karakter, moral, dan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Literasi yang dikaji memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan Islam menempatkan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan keterampilan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut peneliti, pendekatan holistik ini menjadi kekuatan utama pendidikan Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Arah kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi tidak dapat dilepaskan dari cita-cita besar pembangunan bangsa, yaitu membangun masyarakat madani Indonesia. Reformasi membawa perubahan paradigma kebijakan yang lebih demokratis dan partisipatif, termasuk dalam pengelolaan pendidikan Islam. Dalam pandangan peneliti, orientasi kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam diposisikan sebagai fondasi moral dan sosial dalam membentuk masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Berkaitan dengan cita-cita tersebut, idealnya arah baru paradigma pendidikan Islam diarahkan pada terbangunnya masyarakat madani Indonesia di era milenial. Studi literatur menunjukkan bahwa pendidikan Islam dituntut untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang kontekstual, inklusif, dan relevan dengan kehidupan sosial modern (Indriani, 2021). Peneliti memandang bahwa orientasi ini penting agar pendidikan Islam tidak terjebak pada pola normatif semata, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Era milenial secara tidak langsung menuntut pendidikan Islam untuk terus berbenah dan melakukan pembaruan. Perubahan karakter peserta didik, perkembangan teknologi informasi, serta arus globalisasi menuntut pendidikan Islam

untuk lebih adaptif dan inovatif. Menurut peneliti, tuntutan ini menjadi momentum strategis bagi pendidikan Islam untuk melakukan transformasi tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Dalam menghadapi tuntutan tersebut, arah kebijakan pendidikan Islam diarahkan pada pembaruan paradigma yang berorientasi pada masa depan. Pembaruan mencakup pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendidikan. Peneliti berpandangan bahwa pembaruan ini harus dilakukan secara terencana dan sistematis agar tidak bersifat sporadis dan tetap menjaga substansi pendidikan Islam.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam berupaya menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perubahan global, namun tidak tercerabut dari akar teologis dan moralnya. Dalam pandangan peneliti, keseimbangan ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang menentukan keberhasilan arah kebijakan pendidikan Islam ke depan.

Secara keseluruhan, hasil studi literatur menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan Islam bergerak menuju penguatan peran strategisnya dalam membangun sumber daya manusia dan masyarakat madani Indonesia. Pendidikan Islam diarahkan untuk menjadi sistem pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berorientasi masa depan, sekaligus tetap menjaga substansi nilai-nilai keislaman. Menurut peneliti, arah kebijakan ini hanya akan tercapai secara optimal apabila diikuti dengan komitmen kebijakan yang konsisten dan implementasi yang berkelanjutan di tingkat lembaga pendidikan.

### ***Integrasi Nilai Keislaman dan Ilmu Pengetahuan***

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Integrasi ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pendidikan Islam. Melalui pendekatan integratif, pendidikan Islam diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa integrasi nilai keislaman dan ilmu pengetahuan diwujudkan melalui pengembangan kurikulum, pendekatan pembelajaran kontekstual, serta penguatan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap mata pelajaran. Pendidikan Islam tidak lagi memosisikan ilmu agama dan ilmu umum sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Dengan demikian, kebijakan ini diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual (Muis et al., 2021).

Menurut peneliti, integrasi nilai keislaman dan ilmu pengetahuan merupakan arah kebijakan yang tepat dan relevan dengan tantangan pendidikan kontemporer. Namun, integrasi tersebut tidak cukup hanya pada tataran konsep, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam perencanaan kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Peneliti memandang bahwa tanpa

pemahaman yang komprehensif dari pendidik, integrasi ini berpotensi hanya menjadi jargon kebijakan tanpa dampak substantif.

Lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa keberhasilan integrasi nilai keislaman dan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya akademik di lembaga pendidikan Islam. Diperlukan penguatan kapasitas pendidik, pembaruan bahan ajar, serta dukungan kebijakan yang konsisten agar integrasi tersebut benar-benar mampu membentuk lulusan pendidikan Islam yang kompeten, berakhlak, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

### ***Digitalisasi dan Adaptasi terhadap Era Society 5.0***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi fokus utama dalam arah kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam menghadapi era Society 5.0. Kebijakan pendidikan Islam mendorong lembaga pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, memanfaatkan platform digital, serta mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Digitalisasi dipandang sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas akses pendidikan Islam.

Studi literatur juga mengungkapkan bahwa adaptasi terhadap era Society 5.0 menuntut pendidikan Islam untuk mengembangkan model pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Teknologi digital memungkinkan terjadinya pembelajaran kolaboratif, pemanfaatan sumber belajar yang lebih luas, serta peningkatan kreativitas dan kemandirian belajar peserta didik. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam di tengah perkembangan global (Rozak, 2021).

Menurut peneliti, digitalisasi dalam pendidikan Islam merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, namun perlu diiringi dengan kesiapan pedagogis dan etika penggunaan teknologi. Peneliti memandang bahwa pemanfaatan teknologi digital harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman agar tidak menimbulkan degradasi moral atau ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi perlu dirancang secara selektif dan berorientasi pada tujuan pendidikan Islam.

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa tantangan utama digitalisasi pendidikan Islam terletak pada kesenjangan akses dan kompetensi teknologi antar lembaga dan pendidik. Tanpa dukungan infrastruktur dan pelatihan yang memadai, kebijakan digitalisasi berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan Islam. Dengan demikian, digitalisasi harus diiringi dengan kebijakan pemerataan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

### ***Penguatan Moderasi Beragama***

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama menjadi bagian penting dari arah kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam diarahkan untuk menanamkan nilai toleransi, keseimbangan, dan sikap inklusif dalam kehidupan beragama. Kebijakan ini bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman keagamaan yang moderat serta mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa moderasi beragama diintegrasikan dalam kurikulum, proses pembelajaran, serta budaya sekolah atau madrasah.

Pendidikan Islam diharapkan tidak hanya menekankan aspek normatif keagamaan, tetapi juga mengembangkan sikap dialogis, saling menghargai, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah munculnya sikap ekstremisme (Yana & Susanti, 2024).

Menurut peneliti, penguatan moderasi beragama merupakan arah kebijakan yang sangat relevan dengan kondisi sosial Indonesia yang plural. Peneliti memandang bahwa pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai moderasi sejak dini, terutama melalui keteladanan pendidik dan pembiasaan dalam lingkungan pendidikan. Tanpa pendekatan yang tepat, kebijakan moderasi beragama berpotensi hanya menjadi wacana formal tanpa internalisasi nilai yang mendalam.

Lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa tantangan utama dalam penguatan moderasi beragama adalah konsistensi implementasi di tingkat satuan pendidikan. Diperlukan sinergi antara kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran agar nilai moderasi beragama benar-benar menjadi bagian dari karakter peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu memberikan pedoman yang operasional dan berkelanjutan dalam penguatan moderasi beragama.

### ***Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam***

Meskipun arah kebijakan pendidikan Islam telah dirumuskan secara progresif, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan mutu antar lembaga pendidikan Islam, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perbedaan kapasitas manajemen dan pendanaan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam belum berjalan secara merata.

Hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi pendidik, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan penerapan metode pembelajaran inovatif, menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan. Selain itu, lemahnya perencanaan dan evaluasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan normatif yang tertuang dalam regulasi dengan praktik pembelajaran di lapangan (Solehudin, 2023).

Menurut peneliti, tantangan implementasi kebijakan pendidikan Islam menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan lapangan. Peneliti memandang bahwa kebijakan yang bersifat top-down tanpa diiringi pendampingan dan pengawasan yang memadai akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan Islam secara berkelanjutan.

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, dan masyarakat. Tantangan kebijakan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan komitmen bersama dan kebijakan yang konsisten. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam diharapkan tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga efektif dan berdaya guna dalam praktik pendidikan.

## SIMPULAN

Kesimpulan studi literatur ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami pergeseran signifikan menuju penguatan kualitas, relevansi, dan daya saing. Pendidikan Islam tidak lagi diposisikan hanya sebagai pewarisan nilai keagamaan, tetapi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berperan strategis dalam pembentukan karakter, moral, dan kompetensi peserta didik. Integrasi nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, digitalisasi pendidikan, serta adaptasi terhadap era Society 5.0 menjadi arah utama kebijakan, dengan tetap menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan holistik pendidikan.

Di sisi lain, penguatan moderasi beragama menjadi elemen penting untuk menanamkan nilai toleransi, inklusivitas, dan keseimbangan dalam masyarakat majemuk. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan mutu, keterbatasan kompetensi pendidik, dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan Islam menuntut konsistensi implementasi, penguatan sumber daya manusia, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Azis, Z. A. (2024). *Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia*. 02(02).
- Elman, M. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ABAD 21. *COGNITIVE: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN*, Vol. 2, No, 24–34.
- Fadli, M. R., Hizbulloh, P., Loji, N. S., M, F. A., Sukman, S., Pendidikan, M., Islam, A., Pascasarjana, P., & Sorong, I. (2024). TANTANGAN DALAM EVALUASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM CHALLENGES IN THE EVALUATION OF ISLAMIC EDUCATION. 7461–7468.
- Indriani, W. (2021). TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MILENIAL. *ANWARUL : Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, Volume 1, 89–101.
- Ismael, F. (2023). *Strategi Pendidikan Islam Di Era Digital : Peluang Dan Tantangan*. 3, 4526–4533.
- Maliki, P. L. (2022). ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PASCA REFORMASI DI INDONESIA. 10(1), 84–96.
- Muis, A., Pawero, D., Agama, I., Negeri, I., & Manado, I. (2021). *Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan*. 4(1).
- Rozak, A. (2021). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. 3(25), 197–208.
- Solehudin, S. (2023). *Tantangan dunia pendidikan islam dan implikasinya terhadap perubahan kebijakan*. 5(2), 159–166.
- Yana, H. H., & Susanti, L. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Era Globalisasi di Madrasah*. 1(1), 0–13.